

**FUNGSI PEMBINAAN PEMERINTAHAN KEPENGHULUAN TERHADAP
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KEPENGHULUAN DI KEPENGHULUAN BAGAN
NIBUNG KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

TAHUN 2015-2016

Oleh: Nurhazizah

Email : Nurhazizah0595@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

The Government of Village has the authority to supervise the existing social institutions in every kepenghuluan, the guidance done by the introduction of duties and functions of every institution namely the institution of PKK and the RW . This study aims to find out the guidance of government kepenghuluan to community institutions in Village Bagan Nibung District Simpang Kanan Kistrict RokanHilir.

This research uses qualitative research method with descriptive research type, which can be interpreted as problem solving process investigated by describing the state of research subject based on facts that appear during the research which then proceed with based on existing theories. Development of government kepenghuluan in conducting coaching has not run maximally, government kepenghuluan only provide guidance about the main task and function, Because so far there is no coaching from local government so that institution in carrying out duty and function not yet fully reached.

Based on the results of research that has been done on the function of fostering governance kepenghuluan to community institutions kepenghuluan in kepenghuluan Bagan Nibung Simpang Kanan District Rokan Hilir District 2015-2015 researchers can conclude that, the guidance is do by government kepenghuluan to community institutions less maximum so that community institutions especially PKK And RW has not done its job well. Should the local government should provide guidance to the government kepenghuluan about community institutions such as training so that coaching conducted by the government Village should run optimally. Obstacles faced by the government village and community institutions in carrying out activities namely, working conditions, skills and human resources.

Keywords: Guidance, Governmental Affairs, Community Institutions

Pendahuluan

Pada umumnya lembaga-lembaga masyarakat terdiri dari lembaga formal dan nonformal. Lembaga masyarakat yang bersifat formal adalah lembaga didirikan atau disponsori oleh pemerintah dan mungkin dibiayai oleh pemerintah pusat, daerah dan desa. Lembaga nonformal ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri, atau sekelompok warga tertentu, dan pembiayaan atau dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat bersangkutan.

Lembaga kemasyarakatan menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 adalah "Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat". Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 bahwa yang dimaksud dengan Lembaga kemasyarakatan adalah, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, atau sebutan lain.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dikenal istilah lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu organisasi masyarakat yang berada diwilayah kelurahan/desa. Pada saat mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 aturan tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan dari desa dan masyarakat desa itu sendiri. Secara realita lembaga kemasyarakatan tersebut seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan lain-lain, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membantu tugas-tugas pemerintah, khususnya tugas kepala desa dalam pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan/pemberdayaan masyarakat.

Tugas lembaga PKK desa terdiri dari membantu rencana kerja PKK desa, melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan, melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK desa, menggali dan menggerakkan potensi desa, mengadakan kegiatan yang telah diinstruksikan, melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga, berpartisipasi dalam program instansi pemerintah, membuat laporan hasil kegiatan, dan mengadakan konsultasi dengan Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK telah berperan sebagai:

1. Motivator masyarakat
2. Aspirator masyarakat
3. Inspirator pembangunan
4. Komunikator antara masyarakat dengan kepala desa
5. Mediator antara masyarakat dengan pemerintah

Tugas lembaga rukun warga adalah sebagai berikut:

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menggerakkan gotong royong swadaya dan partisipasi masyarakat.
3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
4. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.
5. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah daerah.
7. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

8. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah.
9. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Menurut Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Bab XI Pembinaan dan Pengawasan desa oleh Camat atau sebutan lain Pasal 154:

1. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala desa
 - b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
 - c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
 - d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
 - f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
 - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
 - h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 - j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
 - k. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
 - m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
 - n. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga

- o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
- p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- q. Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya
- r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya. Fungsi pembinaan pemerintahan kepenghuluan sebagai berikut:
 - a. Memberikan bimbingan
 - b. Memberikan pengarahan
 - c. Memberikan pendidikan dan pelatihan
 - d. Memberikan instruksi dan buku petunjuk Berdasarkan penjelasan fenomena yang terjadi di Kepenghuluan Bagan Nibung bahwa pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan tidak terlihat aktivitasnya, dikabupaten Rokan Hilir sendiri belum adanya peraturan daerah mengenai lembaga kemasyarakatan. Sehingga pembinaan dari pemerintahan kepenghuluan terhadap lembaga kemasyarakatan untuk membantu tugas pemerintahan kepenghuluan belum dilaksanakan, dan partisipasi masyarakat yang kurang dalam ikut serta kegiatan lembaga kemasyarakatan, serta kurang pemahannya lembaga kemasyarakatan tentang fungsi dan tugasnya, maka dari itu perlu pembinaan dari pemerintahan kepenghuluan agar kegiatan berjalan dengan baik.

Berdasarkan keadaan diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Fungsi Pembinaan Pemerintahan Kepenghuluan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2015-2016”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Fungsi Pembinaan Pemerintahan Kepenghuluan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan tahun 2015-2016.

Dari masalah pokok tersebut dapat dijabarkan pertanyaan spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi pembinaan pemerintahan kepenghuluan terhadap lembaga kemasyarakatan PKK dan RW di Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir ?

Apa faktor-faktor penghambat pembinaan Pemerintahan Kepenghuluan terhadap lembaga kemasyarakatan Pemerintahan Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2015-2016?

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Studi Penelitian Terdahulu

Dari beberapa studi terdahulu, *Jurnal Tanjung Pura 2015 yang ditulis oleh Hironimus Adven dengan judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Lembaga masyarakat Desa di Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau* masih sangat kurang. Hal ini dilihat dari lembaga kemasyarakatan desa kurang terlihat aktifitasnya, namun dalam kenyataan tidak setiap lembaga-lembaga masyarakat berjalan dengan baik atau dapat dirasakan peranannya. Selain itu masyarakat desa bahkan tidak mengetahui apa itu lembaga masyarakat dan apa saja tugas pokok dan fungsi dari lembaga masyarakat tersebut.

Sri Susanti dalam jurnal Administrasi Negara yang berjudul "*Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di*

Desa Sukamaju Kecamatan Tegarong Sebarang" menyimpulkan bahwa, Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Tegarong Sebarang masih kurang peranannya dalam memberdayakan masyarakat, hal ini diketahui dari hasil pra penelitian dengan wawancara padaa warga desa yang ada dilokasi penelitian yang menyatakan bahwa kurangnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa melalui program pembangunan pertanian yang merupakan sumber pencaharian masyarakat desa sukamaju yaitu, pendapatan para petani yang masih rendah sehingga penduduk desa cenderung mengalami kemiskinan.

1.4.2 Pembinaan

Pembinaan menurut asal kata *bina* yang artinya sama dengan bangun, jadi pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu menjadikan sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan yang memiliki usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada "perbaikan" atas sesuatu. Isitilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan hal-hal dalam persoalan manusia. Menurut Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul "*pembinaan Organisasi*" mendefenisikan pengertian pembinaan bahwa:

- a. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses atau pernyataan menjadi lebih baik.
- b. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari sistem pembaruan (*change*).
- c. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana pembaruan yang berencana serta pelaksanaannya.
- d. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu

perubahan dan pembaruannya yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Menurut Widjaja (2000:14) pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut disertai usaha-usah perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Dari beberapa defenisi diatas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan dan tindakan pembinaan selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, pengendalian.

Selanjutnya, menurut pendapat Santoso S. (1995:52) yang mengungkapkan beberapa cara dilakukan dalam pembinaan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pemberian bimbingan
- c. Memberikan pengarahan
- d. Memberikan pendidikan dan pelatihan.

1.4.3 Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 adalah "Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayaan masyarakat". Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 bahwa yang dimaksud dengan Lembaga kemasyarakatan adalah, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, atau sebutan lain.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dikenal istilah lembaga

kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu organisasi masyarakat yang berada diwilayah kelurahan/desa. Pada saat mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 aturan tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan dari desa dan masyarakat desa itu sendiri. Secara realita lembaga kemasyarakatan tersebut seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan lain-lain, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membantu tugas-tugas pemerintah, khususnya tugas kepala desa dalam pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan/pemberdayaan masyarakat.

1.4.4 Kewenangan

Menurut Miriam Budiardjo, otoritas atau wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan), yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Dengan nada yang sama dikemukakan Roberth Bierstedt yang mengatakan, wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan), hal senada juga dikatakan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak orang yang memegang kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai

dukungan atau mendapat pengakuan dari warga masyarakat.

KERANGKA TEORI

1. Pembinaan

Pembinaan menurut asal kata *bina* yang artinya sama dengan bangun, jadi pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu menjadikan sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan yang memiliki usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. Istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan hal-hal dalam persoalan manusia. Menurut Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “*pembinaan Organisasi*” mendefinisikan pengertian pembinaan bahwa:

- e. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses atau pernyataan menjadi lebih baik.
- f. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari sistem pembaruan (*change*).
- g. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana pembaruan yang berencana serta pelaksanaannya.
- h. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaruannya yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Menurut Widjaja (2000:14) pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan dan tindakan pembinaan selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, pengendalian.

Selanjutnya, menurut pendapat Santoso S. (1995:52) yang mengungkapkan beberapa cara dilakukan dalam pembinaan adalah sebagai berikut:

- e. Perencanaan
- f. Pemberian bimbingan
- g. Memberikan pengarahan
- h. Memberikan pendidikan dan pelatihan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data biasa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dianggap relevan untuk menguji keabsahan data adalah dengan melakukan triangulasi teknik. Triangulasi teknik berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh melalui wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan dilapangan atau data-data yang ditemukan. Menurut Gubrium dan Hostlein (1992) metode kualitatif adalah cara mengkaji kualitas-kualitas kehidupan keseharian yang mencakup rentang luas, yaitu *from life's action and narrative to its sign, circumstance and sense of reality*. Sehingga penelitian kualitatif berincikan informasi yang berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial.

1.7.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya. Menurut tingkat penjelasannya, teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau fakta tentang fungsi pembinaan pemerintahan kepenghuluan terhadap lembaga kemasyarakatan.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir. Dipilihnya Kepenghuluan Bagan Nibung menjadi lokasi penelitian karena kepenghuluan ini belum melaksanakan fungsi pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan belum maksimal sehingga lembaga kemasyarakatan kurang memahami tugas dan fungsi.

1.7.4 Sumber Data

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* Sugiyono menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Informan adalah orang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latarbelakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Hapidzam Yazid sebagai penghulu kepenghuluan Bagan Nibung, beliau memiliki kewenangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan kepenghuluan.
2. Adi Kuswanto sebagai sekretaris penghulu kepenghuluan Bagan Nibung, beliau mempunyai kewenangan membantu penghulu dalam melaksanakan kebijakannya.
3. Hefi Suriyadi sebagai kaur pemerintahan kepenghuluan Bagan Nibung, beliau memiliki informasi mengenai pembinaan lembaga kemasyarakatan.
4. Nunzairina sebagai ketua pengurus lembaga pemberdayaan kesejahteraan keluarga, beliau memiliki informasi mengenai PKK.
5. Sunardi sebagai ketua RW, beliau memiliki informasi mengenai RW.

1.7.5 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Data tersebut adalah wawancara dengan: penghulu kepenghuluan Bagan Nibung, sekretaris kepenghuluan Bagan Nibung, kaur pemerintahan

kepenghuluan Bagam Nibung, ketua RW 07 Dusun suka makmur kepenghuluan Bagan Nibung, ketua pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

b. Data Sekunder

Data primer adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistic, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya seperti dikutip dari berbagai sumber, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, koran, jurnal, dan peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekun berasal dari dokumen manajerial pemerintah kepenghuluan, program kerja pemerintah kepenghuluan, program kerja jangka menengah desa buku-buku terkait dengan penelitian serta jurnal ilmiah.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pencarian data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan data didefenisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang menagaturnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif. Partisipasi pasif berarti penelitian datang ketempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu *interviewer* dan *interviewee*. Wawancara dengan responden guna mengkonfirmasi data, selain itu memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) berupa daftar pokok-pokok pertanyaan yang harus tercakup oleh pewawancara selama wawancara

berlangsung. Diperlukan fleksibilitas yang luas berkenaan dengan sikap, susunan dan bahasa pada saat pewawancara melakukan tugasnya. Oleh sebab itu teknik wawancara yang dilakukan tidak dengan satu struktur ketat, sehingga dapat diperoleh informasi yang lengkap dan mendalam. Kelonggara ini senantiasa member kesempatan kepada informan untuk dapat memberikan jawaban secara bebas dan jujur. Menurut patton, wawancara semacam ini dapat pula disebut sebagai *indepth interviewing* atau menurut Mc Crachen disebut *the long interview*. Dengan teknik wawancara ini akan mendorong terciptanya hubungan baik antara peneliti dan informan sehingga sangat membantu dalam upaya memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukann penulis dalam hal ini yaitu Tanya jawab dengan penghulu kepenghuluan Bagan Nibung, sekretaris kepenghuluan Bagan Nibung, kaur Pemerintahan kepenghuluan Bagan Nibung, Ketua pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, ketua RW 07 dusun suka makmur kepenghuluan Bagan Nibung.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen. Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah sumber data berupa tentang pembinaan Pemerintahan Kepenghulan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan serta arsip yang relevan. Teknik dokumentasi ini akan penulis gunakan untuk memperoleh data-data tentang Fungsi Pembinaan Pemerintahan Kepenghulan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan.

HASIL PENELITIAN

3.1. Memberikan Bimbingan

Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk mengajak, mengiring,

menuntun, memotivasi, serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana. Yang dimaksud peneliti disini dimana Pemerintahan Kepenghuluan Bagan Nibung dapat mengajak, mengiring, menuntun, memotivasi serta mendorong lembaga masyarakat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Warga (RW) di Kepenghuluan Bagan Nibung agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berkaitan dengan urusan meningkatkan kreatifitas kemampuan masyarakat, kerja sama, serta mengembangkan pola pikir masyarakat di Kepenghuluan Bagan Nibung sesuai dengan tugas dan tupoksi Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Warga (RW) sendiri. Pemberian dan dukungan dan arahan kepada Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Warga (RW) adalah salah satu lembaga masyarakat dimaksudkan agar tumbuh memotivasi dalam melaksanakan tugas sehingga lembaga masyarakat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Warga (RW) lebih terpacu berinovasi dan berkreasi untuk melaksanakan kegiatannya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Hapidzam Yazid, selaku Penghulu di Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir:

“ Sebenarnya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan khususnya lembaga masyarakat PKK dan RW sering dilakukan seperti pemberian bimbingan terhadap tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga, khususnya lembaga PKK dan RW, tetapi lembaga tersebut kurang memahami dan kurang mendengarkan apa yang disampaikan setiap kali pertemuan pembinaan”.

Kemudian menurut Adi Kuswanto sebagai Sekretaris Kepenghuluan Bagan Nibung:

“ Pembinaan semacam ini sering kali kami selenggarakan terhadap lembaga kemasyarakatan agar mereka tau dimana tupoksi mereka masing-masing dalam melaksanakan tugas, tapi kenyataannya tidak sesuai apa yang kita harapkan selama ini, kesadaran mereka kurang untuk melaksanakan semestisnya tugasnya, sehingga tidak ada kreatifitas mereka dalam merangkul masyarakat agar mau membantu setiap lembaga dalam melaksanakan kegiatan”

Kemudian menurut Hefi Suriyadi sebagai kaur pemerintahan Kepenghuluan Bagan Nibung:

“ Apa yang disampaikan Bapak Penghulu memang benar adanya, karena setiap kali pembinaan seperti memberikan bimbingan memang sepenuhnya hadir tapi mereka kurang memperdulikan apa yang diberikan kepada pemerintahan kepenghuluan, sehingga mereka tidak bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi didalam mensejahterakan kehidupan keluarga dan masyarakat”.

Menurut Bapak Sunardi ketua RW 06 Dusun Suka Makmur Kepenghuluan Bagan Nibung:

“ Saya dipilih warga untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram, untuk saat ini saya menjalankan pemberian bimbingan yang disampaikan Pemerintahan Kepenghuluan sering kebingungan karena masyarakat kurang berpartisipasi didalam mewujudkan kehidupan yang aman dan tentram”.

Menurut Ibu Nunzairina sebagai ketua PKK di Kepenghuluan Bagan Nibung sebagai berikut:

“Sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Penghulu dan memberikan pembinaan bimbingan sudah bagus, hanya saja masyarakat kurang berpartisipasi didalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera seperti didalam keluarga, saya sudah berusaha mengajak kepada ibu-ibu untuk mengikuti arisan atau kegiatan PKK lainnya tetapi mereka sibuk dengan urusan mereka

masing-masing sehingga setiap bulan anggota berkurang”.

3.2. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahap-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sehingga kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

3.2.1. Merumuskan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau yang sering disingkat dengan PKK menurut Pasal 1 point (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 adalah “lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK”.

Berikut adalah tabel rencana pemerintah kepenghuluan dalam pemberdayaan masyarakat tentang kegiatan PKK di Kepenghuluan Bagan Nibung:

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan PKK Kepenghuluan Tahun 2015

Uraian	Volum e	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
2	3	4	5
- Belanja Barang dan Jasa			Rp 10,000,000.00
			Rp 2,000,000.00
Honor Pelatih 4 orang x 1 kegiatan	4 OK	Rp 500,000.00	Rp 2,000,000.00
ATK			Rp 500,000.00
- Kertas HPS	3 Rim	Rp 55,000.00	Rp 165,000.00
- Ballpoint	20 Pc	Rp 3,500.00	Rp 70,000.00
- Map Biasa	30 Buah	Rp 3,500.00	Rp 105,000.00
- Papan Tulis	1 Buah	Rp 125,000.00	Rp 125,000.00
- Spidol	2 Pc	Rp 7,500.00	Rp 15,000.00
- Penghapus Papan Tulis	2 Buah	Rp 10,000.00	Rp 20,000.00
Pengadaan			Rp 750,000.00
- Fotocopy	3000 Buah	Rp 250.00	Rp 750,000.00
Makanan dan Minuman			Rp 3,000,000.00

Makan Minum Rapat 25 org x 5 kali	125 kotak	Rp 20,000.00	Rp 2,500,000.00
Snack Rapat 25 org x 5 kali	125 kotak	Rp 10,000.00	Rp 1,250,000.00
Transportasi dan Akomodasi			Rp 3,000,000.00
Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam dan Luar Kepenghuluan	Ls	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00
Jumlah (Rp)			Rp 10,000,000.00

Sumber : Data Profil Kepenghuluan Bagan Nibung

**Tabel 3.2 Rencana Kegiatan PKK
Kepenghuluan Bagan Nibung
Tahun 2016**

Uraian	Volum e	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
2	3	4	5
- Belanja Barang dan Jasa			Rp 10,000,000.00
			Rp 2,000,000.00

Honor Pelatih 4 orang x 1 kegiatan	4 OK	Rp 500,000.00	Rp 2,000,000.00
ATK			Rp 500,000.00
- Kertas HPS	3 Rim	Rp 55,000.00	Rp 165,000.00
- Ballpoint	20 Pc	Rp 3,500.00	Rp 70,000.00
- Map Biasa	30 Buah	Rp 3,500.00	Rp 105,000.00
- Papan Tulis	1 Buah	Rp 125,000.00	Rp 125,000.00
- Spidol	2 Pc	Rp 7,500.00	Rp 15,000.00
- Penghapus Papan Tulis	2 Buah	Rp 10,000.00	Rp 20,000.00
Pengadaan			Rp 750,000.00

- Fotocopy	3000 Buah	Rp 250.00	Rp 750,000.00
Makanan dan Minuman			Rp 3,000,000.00
Makan Minum Rapat 25 org x 5 kali	125 kotak	Rp 20,000.00	Rp 2,500,000.00
Snack Rapat 25 org x 5 kali	125 kotak	Rp 10,000.00	Rp 1,250,000.00
Transportasi dan Akomodasi			Rp 3,000,000.00
Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam dan Luar Kepenghuluan	Ls	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00
Jumlah (Rp)			Rp 10,000,000.00

Sumber : Data Profil Kepenghuluan Bagan Nibung

3.2.2. Rencana Kegiatan Lembaga Rukun Warga (RW)

Lembaga Rukun Warga (RW) merupakan lembaga yang dibentuk dan berasal dari masyarakat setempat dalam hal ini adalah kumpulan beberapa lembaga RT dalam suatu lokasi tertentu, lembaga kemasyarakatan ini juga diakui keberadaannya dan dibina oleh pemerintah dan pemerintah kota.

Berikut adalah tabel rencana pemerintah kepenghuluan dalam bidang Pemerintahan Kepenghuluan Bagan Nibung:

Tabel 3.3 Rencana Kegiatan RW Kepenghuluan Bagan Nibung Tahun 2015

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
2	3	3	4
Belanja Barang dan Jasa			Rp 99,000,000
Insentif RT/RW			
Insentif Ketua RW 7 Orang x 12 Bulan	84 OB	Rp 250,000	Rp 21,000,000
Insentif Ketua RT 26 Oran g x 12 Bulan	312 OB	Rp 250,000	Rp 78,000,000
Jumlah (Rp)			Rp 99,000,000

Sumber : Data Profil Kepenghuluan Bagan Nibung

Tabel 3.4 Rencana Kegiatan RW Kepenghuluan Bagan Nibung Tahun 2016

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
2	3	3	4
Belanja Barang dan Jasa			Rp 99,000,000
Insentif RT/RW			
Insentif Ketua RW 7 Orang x 12 Bulan	84 OB	Rp 250,000	Rp 21,000,000

Insentif Ketua RT 26 Oran g x 12 Bulan	312 OB	Rp 250,000	Rp 78,000, 000
Jumlah (Rp)			Rp 99,000, 000

Sumber : Data Profil Kepenghuluan Bagan Nibung

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Hapidzam Yazid selaku penghulu di Kepenghuluan Bagan Nibung sebagai berikut:

“ Perencanaan kegiatan PKK dan RW untuk tahun 2015-2016 itu sudah kami buat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan serta kami adakan musrembang kepenghuluan untuk membahas rancangan anggaran biaya ”

Kemudian menurut Adi Kuswanto sebagai Sekretaris Kepenghuluan di Kepenghuluan Bagan Nibung:

“ Perencanaan yang dimaksud dengan bapak penghulu itu memang benar adanya, termasuk didalamnya PKK dan RW untuk pemberdayaan masyarakat, diadakannya musrembang agar masyarakat tahu rencana kerja kepenghuluan didalamnya sehingga perlu sekali dorongan atau partisipasi masyarakat membantu pemerintahan kepenghuluan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera ”.

3.3. Pemberian Pengarahan

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua yang diarahkan mencapai sasaran sesuai perencanaan dari yang memberikan pengarahan, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien.

Pengarahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah desa untuk memberikan arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus

dilakukan oleh lembaga masyarakat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Warga (RW) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemberian arahan yang baik membuat pekerjaan yang dimiliki oleh Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Warga (RW) menjadi baik, hal ini disebabkan Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Warga (RW).

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Kepenghuluan tentang pengarahan yang diberikan Penghulu terhadap Lembaga Kemasyarakatan, dengan mempertanyakan bagaimana perangkat kepenghuluan memberikan pengarahan terhadap lembaga kemasyarakatan.

Berikut wawancara dengan Adi Kuswanto sebagai sekretaris kepenghuluan di kepenghuluan Bagan Nibung :

“ Pembinaan dimaksud seperti pemberian pengarahan belum semestinya di selenggarakan, tetapi kalau rapat mengenai kegiatan-kegiatan seperti kegiatan RW sering juga kami sampaikan bagaimana semestinya RW dan PKK. Kalau khusus pembinaan belum kami lakukan karena kami butuh pembinaan dari camat atau dari kabupaten kota mengenai lembaga kemasyarakatan, bukan untuk kepenghuluan Bagan Nibung saja menuut saya, mungkin beberapa kepenghuluan atau kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir ini belum mengadakan pembinaan khusus untuk lembaga kemasyarakatan ”.

Kemudian menurut Hefi Suriyadi sebagai Kaur Pemerintahan Kepenghuluan di Kepenghuluan Bagan Nibung:

“ Benar apa yang disampaikan oleh sekretaris kepenghuluan, karena kalaulah ada pembinaan dari kabupaten kota kepada camat dan camat memberikan pembinaan kepada setiap Kepenghuluan di kecamatan Simpang Kanan ini, mungkin aparatur kepenghuluan akan lebih mudah untuk memberikan poksinya masing-masing dari setiap lembaga kemasyarakatan itu, dan menurut saya lembaga kemasyarakatan itu

sendiri akan lebih mengerti apa semestinya tugas dan fungsinya selama menjadi ketua lembaga, sehingga mereka bisa merangkul masyarakat yang lainnya untuk berpartisipasi didalam menjalankan kegiatan, contohnya kalau lembaga RW itu seperti gotong royong, ronda malam dan untuk ibu-ibu PKK sendiri seperti menciptakan lingkungan yang indah atau senam untuk keluarga yang sehat jasmani maupun rohani”.

Kemudian menurut Bapak Darwis selaku masyarakat di Kepenghuluan Bagan Nibung:

“ Mungkin memang belum ada semestinya pembinaan dari pemerintahan kepenghuluan, tapi untuk ketua lembaga kemasyarakatan yang telah ditunjuk untuk mempelajari lagi apa semestinya tugas dan fungsinya, kalau memang belum mengerti dengan tugas dan fungsi apa yang semestinya bisa kita kerjakan marilah sama-sama kita menciptakan lingkungan yang aman untuk kepenghuluan kita ini”.

3.4. Memberikan Pelatihan Dan Pendidikan

Pendidikan dimaksud adalah untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan dan pelatihan proses belajar mengajar yang menggunakan metode. Jadi pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan, pengertian, pengetahuan, dan juga untuk menambahkan keterampilan.

Memberikan pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam membekali lembaga masyarakat PKK dan RW melalui pendidikan dan pelatihan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendidikan dalam dan pelatihan yang ada diharap nantinya agar lembaga masyarakat PKK dan RW mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari Pemerintah Desa. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun

Warga (RW) dalam memperbaiki kinerja Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Warga (RW) sendiri. Pentingnya program pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota tim penggerak Lembaga Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Warga (RW) desa dalam mengelola kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksinya. Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk memberdayakan tim penggerak Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Warga (RW) desa untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya yang sistematis dalam meningkatkan kapasitas agar mampu bekerja secara optimal dalam meningkatkan kinerja Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Warga (RW). Tetapi kejadian dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hasil wawancara dengan Adi Kuswanto selaku sekretaris kepenghuluan di Kepenghuluan Bagan Nibung:

“Pemerintahan Kepenghuluan belum melaksanakan pembinaan seperti memberikan pendidikan dan pelatihan karena tidak ada pembinaan dari pemerintah daerah tentang lembaga kemasyarakatan, peraturan daerah mengenai lembaga kemasyarakatan pun belum ada sampai sekarang ini.”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa pemerintahan kepenghuluan dalam melaksanakan pembinaan seperti memberikan pendidikan dan pelatihan sudah terlaksana, hanya saja lembaga kemasyarakatan khususnya PKK dan RW kurang berpartisipasi dan kurang memahami tugas dan fungsi.

Kemudian wawancara dengan Ibu Nunzairina selaku ketua PKK di kepenghuluan Bagan Nibung sebagai berikut:

“ saya selaku orang yang dipercaya oleh pemerintahan kepenghuluan didalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera mengerti apa yang pemerintah kepenghuluan mau, tapi untuk memberi pengertian kepada masyarakat khususnya ibu-ibu pengurus

PKK, karena partisipasi mereka didalam melaksanakan kegiatan atau arisan semakin hari semakin berkurang”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga masyarakat di kepenghuluan Bagan Nibung masih belum berhasil didalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang maju serta masyarakat yang terampil didalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.5. Faktor Penghambat Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) danukun Warga (RW)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendukung dan penghambat Fungsi Pembinaan Pemerintahan Kepenghuluan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kepenghuluan Bagan Nibung yaitu kondisi atau lingkungan yang baik dan faktor penghambat yaitu kurangnya keterampilan masyarakat.

3.5.1. Kondisi Kerja

Menurut Rachmawati (2008:1) yang dimaksud dengan kondisi atau lingkungan adalah kondisi yang dapat dipersiapkan oleh organisasi yang bersangkutan pada organisasi yang didirikan oleh pemerintah. Kondisi atau lingkungan yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah suasana yang dapat mendorong seseorang untuk mengaktualisasikan potensinya dan menampilkan pekerjaan secara baik. Agar kondisi tersebut dapat terwujud, maka suasana kooperatif dan kolaborasi harus diciptakan.¹

Dari analisis penulis terhadap uraian sebelumnya, diperoleh gambaran bahwa kondisi atau lingkungan seperti tersebut termasuk di Kepenghuluan Bagan Nibung, masyarakat sering terlibat dialog santai antara kepala desa dengan masyarakat menyebabkan hubungan semakin akrab, dan tidak terlihat

adanya penghalang dalam melakukan percakapan keterampilan.

3.5.2. Keterampilan

Menurut Robbins (2006:494) pengertian keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat maka salah satu penunjang adalah tingkat keterampilan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keterampilan seseorang maka akan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui keterampilan masyarakat dalam bidang menciptakan lingkungan yang aman dan tentram masih belum optimal. Sebuah organisasi akan lebih berkembang bila memiliki masyarakat yang terampil dan memiliki etos kerja yang tinggi seseorang pimpinan harus bisa meningkatkan keterampilan masyarakat agar yang diharapkan dalam organisasi bisa tercapai.

Berdasarkan penjabaran diatas, diketahui untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram harus memiliki tingkat keterampilan atau kreativitas yang tinggi sehingga mampu merubah kondisi masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan tujuan seperti ini ketua lembaga harus mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membantu menjalankan tugas dan fungsi, dimana partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tentram menjadi sangat penting, karena walaupun sudah ada peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat akan tetapi tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka tingkat keberhasilan pembangunan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tentram sangat rendah dan sekaligus masyarakat tetap menjadi tidak tahu, atau tidak mau berkreaitif didalam menciptakan lingkungan yang aman dan tentram.

3.5.3 Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan, sehingga apa yang disampaikan pemerintahan kepenghuluan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan tidak terserap seluruhnya, sehingga kegiatan lembaga kemasyarakatan dalam mewujudkan

¹ Jurnal, Sri Susanti 2015. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Sukamaju*

pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang aman dan tentram kurang tercapai.

4.1. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai fungsi pembinaan pemerintahan kepenghuluan terhadap lembaga kemasyarakatan kepenghuluan di kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015-2015 peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan kepenghuluan terhadap lembaga kemasyarakatan kurang maksimal sehingga lembaga kemasyarakatan khususnya PKK dan RW belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Harusnya pemerintah daerah harus memberikan pembinaan kepada pemerintahan kepenghuluan mengenai lembaga kemasyarakatan seperti pelatihan sehingga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan kepenghuluan semestinya berjalan maksimal.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintahan kepenghuluan dan lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan kegiatan yaitu, kondisi kerja, keterampilan dan sumber daya manusia.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai Fungsi Pembinaan Pemerintahan Kepenghuluan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pihak pemerintahan kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan Pemerintahan Kepenghuluan yang baik, dibutuhkan kemampuan perangkat desa untuk melakukan pembinaan yang lebih baik lagi.
2. Pemerintahan kepenghuluan harus lebih bijak didalam melaksanakan pembinaan seperti meminta kepada pemerintah camat untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.

3. Lembaga kemasyarakatan harus tau tugas dan fungsi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Granit

Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif analisis data*. Jakarta

Faroukh Muhammad & Jail. 2005. *Penelitian Sosial*. Ptik Pres

H.A.W. Widjaja. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta.

Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Pasolog, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Makasar: CV. Alfabetta

Rahyunir Rauf & Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan DiIndonesia*. Pekanbaru. Zanafa Publishing.

Rahardjo Adisasmita. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Graha ilmu. Yogyakarta

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung.

Marzuki. 2003. *Metodologi Riset*. Jogja.

Loekman Soetrisno (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Edi Suharto (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal:

Abdul Rokhim. 2013. *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan* .

Hironimus Adven. 2015. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Di Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*.

Rintaka Hargita Sandhi. 2015. *Ilmu Pemerintahan. Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan Desa*

Supriyono. 2015. *Ilmu Pemerintahan. Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Desa*.

Sri Susanti. 2015. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang*.

Skripsi:

Ichwan Hastona. 2015. *Fungsi Pembinaan lurah Terhadap Rukun Tetangga Dan Rukun Warga*.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan